

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat perlu memberikan pendidikan politik bagi warga negaranya untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem pemerintahan yang efektif. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa partai politik berfungsi sebagai pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik diharapkan bisa menerapkan pendidikan politik dengan baik agar menjadi masyarakat yang dapat menentukan pilihan politiknya secara cerdas yang mengerti cara bersikap yang baik dalam menanggapi permasalahan politik. Hal ini tidak akan pernah terjadi jika pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik tidak diterapkan. Jika partai politik hanya mementingkan kepentingan partainya, maka akan memunculkan kehidupan politik yang jauh dari terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku ini dapat menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga dapat melahirkan ketidakpercayaan politik.

Sebagai suatu lembaga, partai politik tentunya harus memiliki kepercayaan dari masyarakat, tapi pada kenyataannya partai politik merupakan lembaga yang mempunyai kepercayaan rendah dari masyarakat, hal ini dibuktikan oleh beberapa

survei, salah satunya dari Saiful Mujani Research and Consulting yang mengatakan bahwa partai politik memiliki tingkat kepercayaan paling rendah yaitu 45% dibawah DPR.¹ Maka dari itu partai politik harus memberikan pendidikan politik, baik bagi kader maupun masyarakat supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Siwi Ningrum

Penelitian Siwi Ningrum berjudul “*Peran Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kegiatan, faktor yang mendukung dan menghambat pendidikan politik yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pendidikan politik.²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi telah melakukan pendidikan politik sebagaimana fungsinya baik dilakukan melalui sosialisasi,

¹ Saiful Mujani Research and Consulting, *PHK Di Masa Covid-19 dan Sikap Publik Terhadap “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”*, diunduh dari <http://saifulmujani.com/phk-di-masa-covid-19-dan-sikap-publik-terhadap-komite-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>, pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 06:30.

² Siwi Ningrum, *Peran Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2009.

dialog, kunjungan, spanduk, pamflet, diskusi, seminar, media massa, kontak fisik langsung dan pengajian.

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berciri dan bersifat keagamaan, namun pada pendekatan yang lebih personal, hal ini dilakukan supaya menguatkan konsolidasi kaderisasi, sehingga memberikan kesan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai tertutup dan eksklusif.

Hambatan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melaksanakan pendidikan politik adalah masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan, masih adanya sikap pragmatis dan paternalistik dari masyarakat yang pasif, masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, jarak antara tempat tinggal kader dan simpatisan dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai PKS yang berjauhan, dan waktu untuk kegiatan yang sangat sulit dikarenakan kesibukan masing-masing.

2. Muhammad Ihsan

Penelitian Muhammad Ihsan berjudul *“Peran Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone)”*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pendidikan politik serta kendala yang dilakukan

oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Bone.³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, Partai Golkar telah menjalankan salah satu fungsi partai politik yaitu melaksanakan pendidikan politik kepada kader, simpatisan, maupun masyarakat secara umum. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar melalui sosialisasi, dialog, kunjungan, spanduk, pamflet, diskusi, seminar, media massa, dan kontak politik langsung.

Hambatan yang dihadapi oleh Partai Golkar dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Bone masih rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat Kabupaten Bone dalam pertemuan-pertemuan. Masih adanya sikap pragmatis dan paternalistik dari masyarakat yang pasif pada setiap pertemuan-pertemuan, dan terkadang APBN dan APBD terlambat diberikan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Bone yang secara otomatis DPD Partai Golkar Kabupaten Bone tidak dapat melaksanakan pendidikan politik baik kepada kader nya maupun kepada masyarakat kabupaten Bone.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

³ Muhammad Ihsan, *Peran Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone)*, Institut Agama Islam Negeri Bone, Jurnal Al-Dustur; Volume 1 No 1, 2018.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Sekarang

Penelitian Terdahulu		Penelitian Sekarang	
Siwi Ningrum (2009)	Yang diteliti adalah pendidikan politik oleh DPD Partai PKS Kabupaten Bekasi	Wahyu Tirta Nugraha (2021)	Yang diteliti adalah pendidikan politik oleh DPD Partai Gerindra Kota Jambi
Muhammad Ihsan (2018)	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris		Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Pendidikan politik terhadap masyarakat merupakan pendidikan wajib karena dapat meminimalisir sikap pasif masyarakat. Dengan memberikan pemahaman akan pentingnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu partai politik harus membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Namun pada kenyataannya Indonesia jauh dari suasana politik ideal hal ini diakibatkan budaya sikap partisipasi masyarakat masih kurang karena minimnya pendidikan politik itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari perjalanan Indonesia dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

Tabel 1.2
Partisipasi Pemilih dalam PEMILU 2004-2019

Tahun	Partisipasi (%)
2004	77,44
2009	72,56
2014	71,31

Sumber : RPJMN 2015-2019

Dari data diatas bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum cukup memuaskan, dimana tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dari tahun ke tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat akan keikutsertaan berpolitik masih harus ditingkatkan lagi, salah satunya lewat pendidikan politik oleh partai politik kepada masyarakat.

Kota Jambi memiliki jumlah penduduk 604.738 di tahun 2019 yang didominasi oleh penduduk usia 15-64 tahun⁴, memiliki anggota DPRD sebanyak 45 orang anggota. Dengan melihat kondisi Kota Jambi yang didominasi oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih maupun yang akan memiliki hak pilihnya, hal ini seharusnya semakin membuat partai politik untuk terus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun pada kenyataannya Kota Jambi masih harus meningkatkan pendidikan politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat bahwa Kota Jambi masuk 10 besar indeks kerawanan pemilu, rawan politik uang saat pilkada.⁵ ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Jambi sendiri masih perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari Pemilihan Umum Kota Jambi dari tahun 2010-2020 yang masih jauh dari target nasional yaitu 77,5 %, yang seharusnya masyarakat kota memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Jambi, *Statistik Daerah Kota Jambi 2020*, (Jambi: BPS Kota Jambi, 2020), hlm. 2.

⁵ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu (Ikp) Pilkada Serentak 2020*, (Jakarta: Bawaslu, 2020), hlm. 153.

Tabel 1.3
Partisipasi Pemilih dalam PILGUB 2010-2020 Kota Jambi

Tahun	Partisipasi (%)
2010	62.09
2015	66.72
2020	65.10

Sumber : KPU Kota Jambi

Dari data diatas bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Jambi masih diantara angka 62-66 %, hal ini mestinya menjadi tugas bagi partai politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat, di Kota Jambi sendiri Partai Gerindra seharusnya memberikan pendidikan politik dengan maksimal kepada masyarakat Kota Jambi mengingat Partai Gerindra adalah partai mayoritas.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 yang diketuai oleh Prabowo Subianto, yang memiliki visi menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat dibidang politik, berkepribadian dibidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.⁶

Pada periode 2019-2024 di Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didominasi oleh Partai Gerindra, hal inilah yang mendasari kenapa penulis memilih Partai Gerindra sebagai objek penelitian. Selain itu dalam

⁶ Badan Komunikasi Partai Gerindra, *Sejarah Partai Gerindra*, diakses dari <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra/>, pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 21:00.

anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Gerindra Pasal 11 Ayat (2) mengatakan bahwa Partai Gerindra berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Jambi tidak luput dari perhatian masyarakat. Karena Partai Gerindra sendiri merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Jambi, Partai Gerindra mengalami kenaikan yang cukup pesat dalam menduduki kursi DPRD, hal ini dapat dilihat dari perolehan sebelumnya, dimana partai tersebut memperoleh lima kursi di DPRD Kota Jambi, yang kemudian pada periode berikutnya naik menjadi mayoritas kursi terbanyak dengan tujuh kursi di periode 2019-2024.

Partai politik masih belum melaksanakan pendidikan politik sebagaimana fungsinya, mengingat tidak adanya sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam tayangan Perkasa Podcast bertajuk Beragam Polemik di Tengah Pandemi mengatakan bahwa masih ada segelintir politisi yang kurang memiliki jiwa bernegara dan menjaga

Pancasila. Menurutnya, para politisi menjadikan politik sebagai pekerjaan, bukan pengabdian.⁷

Meskipun memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kota Jambi, Partai Gerindra Kota Jambi belum bisa menjadi acuan bahwa Partai Gerindra juga telah memberikan pendidikan politik dengan maksimal ke masyarakat Kota Jambi. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kota Jambi. Akan tetapi dengan perkembangan yang baik diharapkan Partai Gerindra mampu memberikan pemahaman tentang pendidikan politik yang baik ke masyarakat Kota Jambi.

Partai Politik diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih, mengingat masih banyak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi di kalangan pejabat pemerintahan yang menjadikan sikap partisipasi pasif masyarakat. Keberadaan partai politik sangat diperlukan dalam menjalankan fungsinya dengan baik, yang pada dasarnya memiliki fungsi dalam memberikan pendidikan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian diatas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang **“Peran Partai Gerindra Kota Jambi Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”**.

⁷ Felldy Utama, *Mahfud MD Sindir Banyak Parpol Belum Optimal Lakukan Pendidikan Politik*, diakses dari <http://nasional.okezone.com/read/2020/10/28/337/2300966/mahfud-md-sindir-banyak-parpol-belum-optimal-lakukan-pendidikan-politik/>, pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 06:30.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Partai Gerindra dalam memberikan pendidikan politik di Kota Jambi?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran pendidikan politik oleh Partai Gerindra di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan peran Partai Gerindra sebagai sarana pendidikan politik di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Partai Gerindra dalam memberikan pendidikan politik di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Gambaran mengenai tujuan penelitian diatas, maka dapat saya disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternatif dalam pengembangan ilmu politik.

2. Manfaat Praktis:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana partai politik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat.
- b. Dapat dijadikan bahan evaluasi dan penyusunan program perbaikan partai politik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam sistem politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksud untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga.⁸

Carl J. Friedrich, mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan

⁸ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 188.

penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.⁹ Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik merupakan perkumpulan manusia yang terorganisir secara stabil untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga dengan cara merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintah dengan dukungan dari rakyat.

2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

P. Anthonius Sitepu dalam bukunya *Studi Ilmu Politik*, mengemukakan adanya 5 (lima) fungsi partai politik. Kelima fungsi partai politik itu meliputi: (i) sebagai sarana komunikasi politik, (ii) sebagai sarana sosialisasi politik, (iii) sebagai sarana rekrutmen politik, (iv) sebagai sarana partisipasi politik, dan (v) sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*).¹¹ Sedangkan tujuan partai politik menurut A. Rahman H.I mengemukakan adanya 4 (empat) tujuan yang meliputi (i) untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik, (ii) untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat, (iii) untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik, (iv) untuk menjadi

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 404.

¹⁰ *Loc. Cit.*

¹¹ P. Anthonius Sitepu, *Op.Cit.*, hlm. 189.

wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.¹²

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa partai politik memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut:

1. Tujuan Partai Politik

Tujuan umum Partai Politik adalah: (a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus Partai Politik adalah: (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (c) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas diwujudkan secara konstitusional.

2. Fungsi Partai Politik

Partai Politik berfungsi sebagai sarana: (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak

¹² A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 103.

dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (d) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam menjalankan fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas diwujudkan secara konstitusional.

3. Hak dan Kewajiban Partai Politik

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa partai politik memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak Partai Politik

Partai Politik berhak: (a) memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; (b) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; (c) memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (d) ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (e) membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (f)

mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (g) mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (h) mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (i) mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (j) membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Partai Politik

Partai Politik berkewajiban: (a) mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; (b) memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) berpartisipasi dalam pembangunan nasional; (d) menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; (e) melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya; (f) menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum; (g) melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota; (h) membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; (i) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan

pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; (j) memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan (k) menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Suatu partai politik dapat timbul karena : (a) Sekumpulan orang bersama-sama mencintai orang atau keturunan dari orang tertentu dan melahirkan partai. Misalnya partai raja, Partai Bonaparte, namun partai-partai ini sudah hamper tidak ada di jaman sekarang ini. (b) Sekumpulan orang mempunyai kepentingan yang sama seperti partai buruh, partai tani, dan lain sebagainya. (c) Adanya asas dan cita-cita politik yang sama seperti partai nasionalis, partai komunis dan lain sebagainya. (d) Adanya persamaan dalam kepercayaan seperti partai Islam, partai Katolik dan lain-lain.¹³

1.5.2 Pendidikan Politik

Pasal 1 Angka 4 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata latin, *educare*, yang berarti melatih. Dalam lapangan pertanian, dikenal kata *educere*, yang berarti menyuburkan atau mengolah tanah agar menjadi subur. Dalam arti demikian,

¹³ Elisabeth Sitepu, *Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Research Sains Volume 2 No.1 Januari 2016, hlm. 3.

pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, dan mengarahkan.¹⁴

Menurut M. Nur Khoiron menyatakan bahwa pendidikan politik bagi warga negara adalah penyadaran warganegara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik. Pendidikan politik ini diselenggarakan sebagai upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantapkan kesadaran bernegara.¹⁵

M. Nur Khoiron mengemukakan bahwa tujuan pendidikan politik, antara lain berikut ini: (1) Mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional sebagaimana mendukung proses dan tujuan perkumpulan-perkumpulan warga di masyarakat sipil, (2) Memperdalam pengertian tentang dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, ekonomi, demokrasi dan konstitusi baik di Indonesia maupun di negara-negara barat, (3) Menyemaikan komitmen dan keberpihakan yang rasional atau prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental sebagaimana terungkap dalam dokumen-dokumen ini, seperti Deklarasi HAM beserta konvensi yang menyertai UUD 1945, Pancasila dan Sumpah Pemuda yang telah mengikat bersama sebagai sebuah bangsa dan menjadi wahana untuk membangun kinerja, dan (4) Mempromosikan pengertian tentang peran-peran mendasar dari lembaga-

¹⁴ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: PT Pohon Cahaya, 2017), hlm. 1.

¹⁵ M. Nur Khoiron, dkk, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja)*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 4.

lembaga berikut nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara dan manusiawi di Indonesia.¹⁶

Utsman Abdul Mu'iz Ruslan memaknai pendidikan politik sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.¹⁷

Melihat pernyataan tersebut mengenai pendidikan politik maka dapat saya tarik suatu pengertian bahwa pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan yang ditujukan untuk membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, serta mengarahkan pemahaman politik dan kesadaran politik setiap warga negara.

Menurut Kuntowijoyo bentuk pendidikan politik, yakni (1) pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi, (2) pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal, seperti melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁷ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Metode Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 58.

1.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Pada dasarnya kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variable yang akan diteliti.

Adapun kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



Dalam kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang partai politik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2011.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Jambi dapat memberikan pendidikan politik melalui pendidikan formal maupun nonformal kepada masyarakat di Kota Jambi, guna meningkatkan pendidikan politik masyarakat dalam mendalami hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Penelitian ini bisa juga dikatakan sebagai kelanjutan dari penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif telah menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian ini mengungkapkan secara lebih detail. Penelitian ini diidentikkan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan "BAGAIMANA" dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah: (a) menggambarkan mekanisme sebuah proses, (b) menciptakan seperangkat kategori atau pola.¹⁹

¹⁹ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2016), hlm. 37.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Jambi dan kantor pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Kota Jambi. Dipilihnya tempat tersebut karena berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang akurat.

1.7.3 Fokus Penelitian

Focus penelitian yang nantinya akan memberikan informasi selama penelitian ini adalah :

1. Pendidikan politik yang dilaksanakan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ke masyarakat Kota Jambi.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di lapangan.

1.7.4 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang dibentuk secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.²⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu, data yang diperoleh

²⁰ Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 22.

dari informan dalam penelitian ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data dari literatur baik itu buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, UU, buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi masyarakat.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan dan Responden Yang Digunakan

Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian, karena orang-orang tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan keterlibatan seseorang dengan objek penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik, yaitu *purposive sampling* dan *cluster sampling*.

1. *Purposive Sampling*

Dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat Kota Jambi dan pengurus dari Partai Gerindra di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan pengurus Partai Gerindra sendiri yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pendidikan politik ke masyarakat luas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), Hlm. 183.

2. Cluster Sampling

Teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel apabila obyek yang diteliti atau sumber data sangat luas.²² Dalam penelitian ini masyarakat Kota Jambi yang menjadi informan dikelompokkan menjadi enam dari sebelas kecamatan yang sudah ada, kemudian pengelompokan didasarkan dari jumlah populasi dengan interval yang telah ditentukan.

Tabel 1.4
Jumlah Populasi Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Populasi
1	Danau Teluk	12160
2	Pasar Jambi	12465
3	Pelayangan	13803
4	Danau Sipin	49152
5	Telanaipura	51451
6	Jambi Selatan	62907
7	Jelutung	64213
8	Jambi Timur	67234
9	Kota Baru	78620
10	Paal Merah	91383
11	Alam Barajo	101350

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi

Dari data diatas maka diambil kecamatan Danau Teluk, Pelayangan, Telanaipura, Jelutung, Kota Baru dan Alam Barajo sebagai pemilihan kecamatan untuk diteliti. sehingga dapat mewakili daerah yang memiliki jumlah populasi yang banyak maupun daerah dengan jumlah populasi yang sedikit.

²² Garaika Darmanah, *Metode Penelitian*, (Lampung: CV. Hira Tech, 2019), hlm. 62.

Masyarakat yang dijadikan sebagai responden dalam kegiatan pendidikan politik berjumlah 91 orang, terbagi menjadi enam kecamatan. Kecamatan Alam Barajo berjumlah 29 orang, Kota Baru berjumlah 23 orang, Jelutung berjumlah 18 orang, Telanaipura berjumlah 14 orang, Pelayangan berjumlah 4 orang dan Danau Teluk berjumlah 3 orang.

Berdasarkan dari teknik tersebut, maka informan yang dianggap penting sebagai sumber data untuk mengetahui fungsi pendidikan politik, faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra adalah:

Tabel 1.5
Daftar Informan Dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Noviard Ferzi, SE, MM.	Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi
2	Syam Hanfiah, SET, S.H, M.H.	Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Jambi
3	Masyarakat Kota Jambi yang terbagi menjadi kecamatan Danau Teluk, Pelayangan, Telanaipura, Jelutung, Kota Baru dan Alam Barajo.	

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan teknik:

1. Observasi, pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²³ Metode ini dipakai dengan maksud agar peneliti dapat mengetahui situasi obyek yang diteliti, sebab dengan pengamatan atau observasi ini peneliti dapat memperoleh informasi tentang fenomena-fenomena atau gejala-gejala secara umum dari data yang akan ditulis yaitu dengan mengamati langsung ke lokasi penelitian.
2. Wawancara, merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara.²⁴ Proses wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara, kemudian proses wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti memastikan bahwa informan secara sukarela bersedia untuk diwawancarai tanpa ada unsur pemaksaan melainkan karena keinginan dari informan sendiri. Kerahasiaan terkait dengan privasi seperti nama dan alamat informan dirahasiakan dari publik supaya informan tidak merasa dirugikan.²⁵

²³ Sutrisno Hadi, *Methodology Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

²⁴ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 120.

²⁵ Fatimah Mardiyah, *4 Etika Wawancara Penelitian yang Perlu Kamu Perhatikan*, diakses dari, <http://blog.temppointstitute.com/berita/etika-wawancara-penelitian/>, pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 21:00.

3. Pengkajian Dokumen, berbagai jenis dokumen dapat digunakan peneliti sehubungan dengan penelitian kualitatif.²⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku, arsip dan dokumen resmi.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai *kegiatan* memberi telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasai.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis preskriptif. Sifat analisis preskriptif ini adalah untuk dapat memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan, argumentasi disini dilakukan peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁷

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.²⁸

Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.²⁹ (1) Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, (2) Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda satu sama lainnya, peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait hingga didapatkan kepastian dan kebenaran datanya, (3) Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

²⁸ Lexy J. Melong, *Op.Cit.*, hlm. 330.

²⁹ Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Volume 12 Edisi 3 Agustus 2020, hlm. 150.